

**RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI**

**PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA  
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**



**Diajukan oleh :**

**TRINITA TAMPUBOLON**

**NPM : 110510511**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA**  
**SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**



**Diajukan oleh :**

**TRINITA TAMPUBOLON**

**NPM : 110510511**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui**

**20 Oktober 2015**

**Dosen Pembimbing**


**Dr.C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.**

# **Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta Sebagai**

## **Jaminan Fidusia**

Trinita Tampubolon

Dr.C. Kastowo,SH. MH.

Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### ***ABSTRACT***

This legal writing, entitled Protection of Moral Rights Associated with the Creator Copyright As Fiduciary. Legal issues in the writing of this law is how the protection of the moral rights of the creators associated with copyright as a fiduciary and whether the material is a guarantee institution guarantees the right as an institution guarantor of copyright. This study aimed to obtain, understand, and analyze how the protection of the moral rights of the creators whose work becomes a guarantee and whether the guarantee institution has the right material as the container guarantor of copyright. Type of research is a kind of normative legal research by conducting legal research on poitif to obtain primary data as the main data and researching the literature to obtain secondary data. Data analysis method used is qualitative data analysis methods. Ini legal research thesis results can be concluded that the protection of rights of creators morall valid for a lifetime and normatively appropriate institution has fiduciary serve as guarantor institution of copyright but the process of registration as a security object ciota rights need to be considered.

Keyword : protection, moral rights, fiduciary

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi kreatif atau bisa disebut industri kreatif merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas,

keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.<sup>1</sup> Praktiknya, tidak dapat dipungkiri, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap industri kreatif tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa karena memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, seperti menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbaru, menjadi pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas serta dapat mencetak generasi-generasi muda yang potensial dan memiliki dampak sosial yang positif lainnya.<sup>2</sup>

HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.<sup>3</sup> HKI secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hak cipta dan hak milik industri, dan tidak dapat dipungkiri salah satu yang menjadi penyokong di bidang HKI dalam perekonomian adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptanya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak ini timbul secara otomatis setelah karya intelektual atau ciptaannya dilahirkan dan

---

<sup>1</sup> <http://arif-dani.blogspot.com/2012/01/peran-industri-kreatif-dalam.html> diakses tanggal 17-April-2015.

<sup>2</sup> <http://andichairilfurgan.wordpress.com/tag/industri-kreatif/> diakses tanggal 10 Mei 2015.

<sup>3</sup> <http://qiqwanggu.blogspot.com/2012/05/hak-kekayaan-intelektual-haki.html>, diakses tanggal 10 Mei 2015



diwujudkan dalam bentuk tertentu dan pada saat itulah hak cipta menjadi milik penciptanya.

Hak Cipta tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau di sebut juga UUHC. Sesuai dengan hak keperdataannya sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, maka juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia,

Hak cipta sebagai jaminan tentu saja dimungkinkan mengingat hak cipta sendiri mengandung dua dimensi yang khas yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yang memberikan keuntungan inilah, maka dikatakan hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Jaminan fiducia adalah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak disamping gadai yang lahir dari yurisprudensi.<sup>4</sup> Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, umumnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda persediaan (barang inventaris), barang dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor namun, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, maka objek jaminan

---

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, cetakan pertama, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.59

fiducia menjadi luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.<sup>5</sup> Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud masuk dalam kategori objek jaminan fiducia.

Berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, maka tidak ada lagi keraguan yang timbul tentang status hak cipta sebagai benda objek hak jaminan dalam hal ini fiducia namun, secara teoritis terdapat beberapa hal yang cukup penting menyangkut fiducia hak cipta yaitu terkait perlindungan terhadap hak pencipta itu sendiri yaitu hak moral pencipta apabila hak cipta tersebut dijadikan sebagai jaminan fiducia dan kesulitan eksekusi terhadap hak cipta yang dijamin.

Seperti yang telah dijelaskan, hak cipta adalah hak yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Kekhasan hak cipta dapat dilihat dari dua dimensi yang terdapat dalam hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral berkaitan dengan hak moral, seperti telah dijelaskan sebelumnya tetap melekat pada diri pencipta walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, hal ini berarti hak cipta sebagai hak kebendaan memiliki ciri-ciri salah satu cirinya adalah *droit de suit* yang artinya pemegang hak cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun hak cipta yang melekat pada benda tersebut berada padahal asas *droit de suit* sendiri pada hakekatnya merupakan asas yang memberikan perlindungan atau kepastian hukum bagi kreditor pemegang jaminan fiducia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fiducia apabila debitor pemberi jaminan fiducia wanprestasi.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.63

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Eksekusi Jaminan Fiducia, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara; *Pertama*, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fiducia; *Kedua*, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaan penerima fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; *Ketiga*, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, padahal hak personal yang kemudian diberikan kepada pencipta atas ciptaannya juga melahirkan doktrin *droit d'auteur* atau *droit moraux* yang mengandung hak *droit de au respect de l'integrite* yaitu hak pencipta untuk mendapatkan ganti rugi materiil jika ciptaannya tersebut dilanggar orang lain atau jika ciptaannya diubah orang lain tanpa seizin pencipta<sup>6</sup> sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian perlindungan terhadap hak moral dari pencipta itu sendiri apabila eksekusi atas jaminan fiducia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Penelitian juga banyak menunjukkan bahwa hak cipta masih sulit untuk dieksekusi seperti objek jaminan fiducia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah sehingga tidak ada jaminan kebendaan lagi akibatnya adalah pelunasan kredit mempunyai masalah. Permasalahan lain adalah ketika debitor wanprestasi dan benda telah dijaminan kepada pihak ketiga, maka hak cipta akan sulit untuk

---

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum hak cipta Indonesia analisis teori dan praktik, cetakan pertama, Citra aditya bakti, Bandung, hlm. 92

dieksekusi. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia mengatur jaminan fiducia terhadap barang bergerak pada umumnya, sedangkan bagaimana membebani fiducia terhadap benda bergerak tidak berwujud sama sekali tidak di atur, sehingga dengan peraturan yang belum jelas ini berpengaruh terhadap penerapannya dalam praktik, para pelaku bisnis kurang atau tidak berani berspekulasi atas resiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena hukum belum memberikan jaminan yang pasti untuk kebutuhan praktik sehingga dari problematik yang telah dipaparkan di atas muncul pertanyaan, bagaimana perlindungan hak moral pencipta dikaitkan dengan hak cipta sebagai jaminan fiducia? dan apakah lembaga jaminan kebendaan sudah tepat sebagai wadah penjamin hak cipta?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitan Dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fiducia?
2. Apakah lembaga jaminan kebendaan khususnya lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang tepat sebagai lembaga penjamin hak cipta?

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan". Patricia Loughlan memberikan pengertian hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>7</sup>

Undang-undang yang hanya mengatur tentang status kebendaan adalah Undang-undang hak cipta.<sup>8</sup> Hak cipta merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana dibicarakan di atas termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta di dalam hukum benda.

Konsekuensi hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud adalah hak cipta seperti benda bergerak lainnya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain maupun dapat dibawa kesana-kemari, akan tetapi cara membawanya tidak seperti benda berwujud lainnya dengan menjinjing,

---

<sup>7</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3.

<sup>8</sup> Gatot supramono, 2010, *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, PT rineka cipta, Jakarta, hlm.27-

memiliki, mengirim, atau mengangkut karena bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada pencipta/pemegang hak cipta.

Hak cipta statusnya tergolong sebagai barang bergerak tidak berwujud mempunyai nilai yang dapat diukur dengan uang dan selain itu dapat dipindahtangankan salah satunya dengan cara perjanjian jual beli oleh karena mempunyai nilai jual maka pada dasarnya hak cipta juga dapat digunakan sebagai jaminan utang, seperti barang-barang bergerak lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Persoalannya, hak cipta sebagai jaminan fidusia tentu saja tidak dapat disita karena melekat dengan diri pemegang hak cipta, hal ini menunjukkan bahwa hukum sebenarnya telah melindungi kepemilikan seseorang sebagai pemegang hak cipta, padahal jika ditinjau dari perjanjian itu sendiri, sesungguhnya debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia karena pada umumnya kreditor (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada debitor (penerima utang) asalkan debitor menyediakan harta kekayaannya guna menjamin kelancaran utangnya, arti penting barang jaminan bukan untuk dimiliki oleh kreditor melainkan apabila dikemudian hari debitor ingkar janji dan utang menjadi macet maka barang-barang jaminan dapat dijual secara lelang dan hasilnya digunakan untuk pelunasan utang.



## **A. Kesimpulan**

Dari Pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya dan disertai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kekementrianan Hukum dan HAM dan kantor Notaris wilayah Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak moral yang dimiliki oleh pencipta pada dasarnya tetap melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sita jaminan atau lelang yang terjadi ketika debitor wanprestasi hanya dipandang sebagai bentuk beralihnya hak ekonomi pencipta namun, tidak dengan hak moral pencipta. Artinya pada saat debitor wanprestasi, maka yang dapat beralih hanyalah hak ekonomi pencipta sedangkan kreditor tetap tidak boleh melanggar perlindungan terhadap hak moral pencipta dengan tetap menantomkan nama pencipta, menggunakan nama samarannya atau aliasnya, dan tetap tidak boleh mengubah isi ataupun judul daripada ciptaan tersebut tanpa persetujuan pencipta.
2. Lembaga jaminan fidusia secara normatif sudah tepat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang objek jaminannya adalah hak cipta. Lembaga jaminan fidusia sudah tepat dikatakan sebagai

lembaga jaminan yang objek jaminannya hak cipta karena yang dapat menjadi objek jaminan fidusia salah satunya adalah benda bergerak dan hak cipta seperti ditegaskan dalam Undang-undang merupakan benda bergerak sehingga dalam hal ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu konstruksi jaminan fidusia atas dasar kepercayaan memungkinkan lembaga objek jaminan berupa hak cipta karena hak cipta tidak harus diserahkan kepada kreditor. Berbeda dengan lembaga jaminan gadai yang mensyaratkan bahwa benda jaminan harus diserahkan kepada kreditor yang dalam hal ini tidak mungkin diterapkan kepada objek jaminan berupa hak cipta karena wujudnya yang tidak terlihat secara fisik maka akan lebih sulit untuk diserahkan dan konsekuensinya gadai dianggap tidak pernah terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahaasan dan hasil yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan, maka saran yang dapat saya berikan antara lain sebagai berikut:

1. Hak cipta sebagai objek jaminan tentu tidak sama dengan objek jaminan pada umumnya yang fisiknya dapat dilihat secara kasat mata sehingga mudah untuk dijamin. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang apabila dijamin bukan berupa fisiknya melainkan haknya sehingga

bagi beberapa kreditor hal ini sangatlah bersiko sehingga kebanyakan mereka menolak apabila hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan karena cenderung sulit untuk dieksekusi. Hal yang sama juga terjadi pada debitor terkait bagaimana perlindungan terhadap hak moral masih banyak belum diketahui oleh pencipta yang ingin menjaminkan ciptaannya sehingga hal ini kemudian menjadi hambatan penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, perlun dibentuk suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia dengan tegas sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan utang. Sosialisai HKI dikalangan masyarakat harus lebih ditingkatkan khususnya mengenai hak cipta tanpa pengecualian. Apabila peraturan yang tegas dan sosialisasi tersebut terlaksana maka hak cipta sebagai jaminan fidusia tentu saja dapat terealisasi.

2. Perlunya hak cipta yang akan dijadikan jaminan fidusia sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam Undang-undang tidak diharuskan suatu ciptaan itu untuk didaftarkan karena system dari hak cipta bukanlah dengan pencatatan (Konstitutif) tatapi dengan pengumuman (deklaratif) saja hak cipta telah diakui. Pendaftaran akan sangat

berguna dalam hal pembuktian kepemilikan hak cipta tersebut, disamping itu masa perlindungan terhadap hak cipta dapat diketahui sehingga nilai ekonomian dari hak cipta masih dapat diketahui.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum*

*HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT.

Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, cetakan pertama*, Nuansa Aulia, Bandung.

Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum hak cipta Indonesia analisis teori dan praktik, cetakan pertama*, Citra aditya bakti, Bandung.

Gatot Suparmono, 2010, *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, PT rineka cipta, Jakarta.

H.Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indoensia*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta

J.Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak jaminan Kebendaan, Hak tanggung*, PT.

Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana dan R. djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori*

*dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Subekti, R, 1996, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit termasuk hak tanggungan menurut hukum Indonesia*. Diolah kembali oleh Johannes Gunawan, Citra aditya bakti,

Bandung.

Sri soedewi masjchun sofwan, 1977, *Beberapa ,masalah pelaksanaan lembaga jaminan khususnya fiducia di dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas hukum

Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, cetakan kelima, Liberty Offset,

Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cetakan pertama, Liberty

Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

Sophar maru Hutagalung, 2012, *Hak cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*, Sinar grafika, Jakarta

Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fiducia suatu kebutuhan yang didambakan*, cetakan pertama, P.T. Alumni, Bandung.

#### **Website :**

Arif dani. (2012). (Online) Peran industri kreatif dalam pembangunan.<http://arif-dani.blogspot.com>.(17 April 2015).

Andi Chairul Furgan. Industri Kreatif. <http://andichairilfurgan.wordpress.com> (10 Mei 2015).



Qiqi. 2012. Hak Kekayaan intelektual. <http://qiqwanggu.blogspot.com>.(10 Mei 2015)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847-23

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fiducia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fiducia